

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena politik lokal diawali dengan reformasi kelembagaan yakni adanya putusan kebijakan desentralisasi yang dilakukan pada masa kolonial hingga sekarang yang mana hal ini bertujuan untuk membangun tatanan demokrasi di tingkat lokal yang bersifat partisipatoris yang memberikan ruang publik bagi semua aktor untuk merumuskan dan memutuskan kebijakan sesuai dengan kebutuhan rakyat. Pembentukan sistem politik di tingkat lokal ini diwujudkan dengan diadakannya pemilihan kepala daerah secara langsung pada tahun 2005, yang mana sebelumnya kepala daerah dipilih oleh DPRD, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ini berpedoman dengan UU nomor 32 tahun 2004 yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah secara langsung.

Pemilihan kepala daerah merupakan wujud dari sistem politik lokal yang mana dapat dipahami sebagai bagaimana bekerjanya sistem politik di daerah dalam mewujudkan tujuan pemberian Otonomi Daerah yang bersifat seluas-luasnya itu, Politik Lokal menerapkan demokratisasi dan desentralisasi yang merupakan tuntutan reformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung merupakan suatu kebutuhan untuk pemeriksaan

terhadap penyimpangan penerapan otonomi daerah yang dilakukan oleh elit politik di tingkat lokal.¹

Dengan adanya perubahan sistem politik sentralisasi atau terpusat menjadi desentralisasi dalam pengelolaan politik dan pemerintahan hal ini berdampak memunculkan gejala politik lokal yang mana terkadang tidak bisa terkontrol. Implementasi politik lokal saat ini dinilai melampaui batas karena elit politik bertindak dan memutuskan kebijakan sesuai kehendak pribadi dan kelompoknya sendiri bukan atas kebutuhan rakyat. Banyak fakta yang menyatakan bahwasanya regenerasi kepala daerah yang pemilihannya dilakukan melalui pemilihan kepala daerah dianggap sebagai ajang pertunjukkan kekuatan politik. Seringkali kepala daerah yang terpilih bukan karena visi misi pembangunan dan kesejahteraan daerah yang membuat rakyat memilihnya namun adanya dukungan dari partai politik, dan elit lokal.²

Di dalam kontestasi politik di tingkat lokal seperti pemilihan kepala daerah secara langsung yang mana dipilih sendiri oleh rakyat dapat memungkinkan adanya calon kepala daerah dipilih atas kepentingan suatu golongan. Karena pada kenyataannya kontestasi politik lokal tidak terlepas dari pertarungan kekuasaan dan perebutan dukungan dari partai politik, elite lokal, kelompok bukan pemerintah, dan masyarakat. Kemenangan kepala daerah selain dari kualitas dan kapabilitas dalam bidang politik, popularitas dan kemampuan pendukung diperlukan karena menentukan hasil dalam kemenangan kepala daerah.

¹ Lili Hasanuddin, *Pemilihan Langsung Kepala daerah menuju terwujudnya pemerintahan lokal yang demokratis di Indonesia*, Makalah pada seminar nasional Pemilihan Langsung Kepala daerah sebagai wujud Demokrasi Lokal, Adeksi 2003.

² Politik Lokal Terhadap Efektivitas Pemerintahan Daerah, <http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Kajian%20Ditpolkom/3>. Diakses pada tanggal 27 Oktober 2021.

Pada penelitian ini, peneliti ingin membahas bagaimana konfigurasi politik lokal seorang pengusaha yang memiliki sumber daya kekuatan finansial terlibat dan mengontrol jalannya demokrasi lokal yang terpilih melalui kontestasi politik lokal. Sumber daya kekuatan finansial menjadi salah satu faktor keberhasilan calon kepala daerah memenangkan kontestasi politik. Firman Noor³, menyebutkan adapun beberapa faktor-faktor dibalik kemenangan dalam kontestasi politik, lima faktor yang dapat mempengaruhi kemenangan dan kegagalan kandidat kontestasi politik, diantaranya:

1. Figur kandidat dilihat berdasarkan asal usulnya dan sikap dalam bergaul di lingkungan masyarakat.
2. Mesin partai atau jaringan relawan yang solid dan juga berkomitmen untuk memenangkan pemilihan.
3. Kemampuan dalam membangun rasa percaya masyarakat dan kedekatannya dengan konstituen.
4. Pemahaman terhadap konteks wilayah pertarungan dalam berkontestasi politik.
5. Program-program yang dipaparkan sebagai kontrak politik dengan masyarakat sangat inovatif dan sejalan dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan terpenuhinya faktor-faktor diatas, ini menjadi suatu kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh calon kepala daerah untuk menggerakkan pendukung dan masyarakat di kontestasi pemilihan kepala daerah.

Fenomena konfigurasi politik lokal Bupati Mustofa Kamal Pasa atau biasa disapa MKP ini memulai perjalanan politik nya di tahun 2010, ia mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah sebagai Bupati yang berpasangan dengan Choirun Nisa keduanya berhasil memenangkan dengan memperoleh 67.34% suara mengalahkan kedua calon yang lainnya Suwandi dan Wahyudi Iswanto hanya

³ Noor, Firman. "Faktor-Faktor di balik Kemenangan." *sindonews*, 03 Juli 2018. <https://nasional.sindonews.com/berita/1318353/18/faktor-faktor-di-balik-kemenangan?showpage=all>. Diakses pada tanggal 03 Maret 2022.

mendapat 30,85% suara dan pasangan Khoirul Badik dan Yazid Kohar hanya meraih 1,73% suara. Ketiga pasangan calon kepala daerah diusung oleh gabungan partai dan satu pasang melalui jalur perseorangan (independen), pasangan calon MANIS atau singkatan dari Mustofa dan Nisa' ini, diusung oleh partai PKB,PPP,PBB,PAN,PKS,PKPB,dan juga Patriot Pancasila, sedangkan pasangan Suwandi dan Wahyudi diusung oleh partai GOLKAR,PDIP,dan Partai Demokrat. Dan pasangan yang terakhir Khoirul Badik dan Yazid Kohar merupakan calon jalur perseorangan atau independen.

Keberhasilan Bupati MKP tidak luput dari faktor-faktor yang mempengaruhi kemenangan kandidat dalam berkontestasi politik. Pasalnya, ia adalah figur yang dikenal sebagai seorang pengusaha yang sukses, berasal dari keluarga yang mumpuni dalam bidang finansial dan *image* pribadi yang baik serta loyal terhadap masyarakat sekitar juga *humble* dalam bergaul. Tak hanya itu, ia memiliki jaringan relawan yang solid dalam mendukungnya hingga berhasil menduduki kursi kepala daerah, program-program yang diajukan sebagai kontrak politiknya dengan masyarakat juga sejalan dengan kebutuhan masyarakat khususnya di Kabupaten Mojokerto.

Kemenangan Bupati MKP ini tidak hanya sekali, karena keberhasilannya merebut hati masyarakat kabupaten Mojokerto dengan pembangunan infrastruktur yang terus dilakukan, pada tahun 2015 ia kembali mencalonkan diri untuk maju menjadi Bupati, diantara paslon yang mendaftarkan diri menjadi bupati MKP sebagai *incumbent* harus melawan wakilnya sendiri yang juga disebut sebagai *incumbent* Bu Nisa' yang mana memilih untuk mencalonkan sebagai Bupati bukan sebagai wakil Bupati karena keduanya semasa menjabat wakil Bupati memiliki perbedaan pendapat dan visi misi dalam membangun kesejahteraan di kabupaten Mojokerto dengan MKP .

Disamping itu berbagai studi tentang politik Bupati Mustofa Kamal Pasa dan yang terkait dengan masalah penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti

sudah banyak diteliti. Selain karena berkembangnya studi politik lokal, fenomena politik Bupati MKP menarik untuk dikaji dalam berbagai perspektif. Diantaranya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hanif Vidi Yuwono tentang “Strategi Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Mustofa Kamal Pasa” dalam penelitian tersebut membahas bagaimana kiat-kiat pendukung MKP yang merupakan lembaga LSM M-Centre dalam memenangkan kontestasi politik Mustofa Kamal Pasa. Penelitian yang lainnya dilakukan oleh Galih Satria yang mana membahas tentang “Relasi-Relasi Kekuatan Politik Lokal dalam Kemenangan Pilkada di Mojokerto”. Penelitian lain juga dilakukan oleh Pratiwi Fajriyah yang mana ia membahas tentang “Pecah Kongsi Petahana dalam Pencalonan Kepala Daerah Pilkada Mojokerto tahun 2015” yang isinya ialah alasan mengapa Bupati Mustofa dan wakil nya Bu Nisa’ memilih untuk mencalonkan sendiri-sendiri pada pemilihan kepala Daerah di Kabupaten Mojokerto. Penelitian lain artikel yang termuat dalam *Journal of Governance and Public Policy* yang berjudul “Modalitas Calon Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015” yang membahas tentang beberapa modal yang harus dimiliki oleh calon kepala daerah dalam memenangkan pemilihan kepala daerah.

Dengan mempertimbangkan berbagai fenomena politik lokal yang terjadi dari berbagai perspektif dan latar belakang Bupati MKP, hal ini menarik peneliti untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana konfigurasi politik lokal pada masa kepemimpinan Bupati MKP selama dua periode ini dalam membangun jejaring sosial melalui basisnya sebagai seorang pengusaha dan mendapatkan dukungan dari partai politik dalam memenangkan Pilkada 2010 dan 2015 keuntungan apa yang didapatkan oleh elit lokal dan partai politik dalam mendukung kemenangan Mustofa Kamal Pasa.

1.2 Perumusan Masalah

Penyelenggaraan pemilihan Kepala daerah tidak terlepas dari berbagai sumberdaya baik material maupun nonmaterial ini yang disebut sebagai kekuatan politik, yang merupakan suatu kelompok yang mempengaruhi proses pembuatan dan keputusan politik dengan sumber-sumber yang dimilikinya. Karena, sejatinya mencalonkan diri sebagai kepala daerah tidak terlepas dari sumber daya politik elit lokal yang terlibat dalam kontestasi politik.

“Political Configuration and Political Dynamics” yang dikemukakan oleh Bertrand De Jouvenel dalam jurnal *“The Review of Politics”* menyatakan bahwasanya yang telah dimuat dalam jurnal *“The Review of Politics”* konfigurasi politik terdiri dari praktek pemilihan atau pilkada, elite lokal, dan kekuasaan yang mana merupakan adanya pengaruh dari elite yang pada praktik politiknya aktor untuk dapat mencapai sebuah tujuan politik yang mana dalam mencapai hal tersebut membutuhkan kontribusi dari orang lain orang lain baik secara individu maupun kelompok. Dalam praktik politik pada dasarnya berhubungan dengan dinamika politik sedangkan ilusinya melekat pada statistik. Kekuasaan politik Bupati MKP ini tidak terlepas dari kekuatan sumber daya politik elite yang bertujuan untuk mencapai dan mempertahankan sumber daya tersebut melalui agenda elektoral tingkat lokal.

Adanya fenomena upaya Bupati MKP yang memulai karirnya sebagai seorang pengusaha kemudian terjun dalam dunia politik menunjukkan domain dalam mempertahankan kekuasaannya dengan memberikan citra politik yang baik kepada masyarakat dan menunjukkan konfigurasi politik lokal Bupati MKP dalam mengontrol elit-elit lokal melalui otoritas politik dan dominasi ekonomi dalam memimpin kabupaten Mojokerto. Pada periode pertama jabatannya menjadi orang nomor satu di Kabupaten Mojokerto ia dan wakilnya di tengah jalan mengalami pandangan yang berbeda dalam meningkatkan kesejahteraan di Kabupaten

Mojokerto sehingga keduanya memilih untuk memecah diri dan melawan satu sama lain di kontestasi pilkada periode berikutnya masa jabatan Bupati MKP.

Berdasarkan uraian diatas peneliti menyimpulkan ke dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Bupati MKP membentuk konfigurasi politik lokal sebagai di Kabupaten Mojokerto?
2. Apa keuntungan yang didapatkan oleh unsur-unsur kekuatan politik Bupati MKP dalam membentuk konfigurasi politik di Mojokerto ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konfigurasi politik lokal Bupati MKP dalam terpilihnya sebagai kepala daerah dalam pilkada di Mojokerto selama dua periode.
2. Untuk mengetahui keuntungan yang didapatkan oleh unsur-unsur kekuatan politik MKP dalam mendukung pemenangannya di pilkada.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dalam melakukan penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Untuk memberikan kontribusi bagi studi tentang konfigurasi politik dalam praktik politik kepemimpinan MKP.
2. Untuk memberikan pandangan baru terhadap kemenangan dan kepemimpinan Bupati MKP selama dua periode pada pilkada tahun 2010 dan 2015 di Kabupaten Mojokerto.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Sebagai kontribusi riil guna memperkaya bahan bacaan politik di Indonesia.
2. Dipergunakan untuk referensi terhadap ketertarikan wacana politik di

Indonesia khususnya tentang konfigurasi politik serta dinamika politik yang dijalankan kepala daerah di Indonesia.

1.5 Kerangka Konseptual dan Teori

1.5.1 Konsep Pilkada

Pilkada merupakan suatu ajang kontestasi politik di tingkat lokal baik kota, kabupaten, maupun provinsi. Berdasarkan pada UU No. 8 tahun 2015 pemilihan kepala daerah, baik Gubernur bersama wakil, Bupati bersama wakil, dan Walikota bersama wakil yang dilaksanakan secara langsung merupakan suatu bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat secara demokratis. Pelaksanaan pilkada dilakukan berkesinambungan dan periodik yang juga dapat dikatakan sebagai mekanisme perubahan politik mengenai arah kebijakan yang memuat suksesi pemimpin di tingkat lokal.

Pemilihan kepala daerah secara langsung dimuat pada pasal 24 ayat 5 UU Pemerintahan Daerah yang berbunyi, “Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam kesatuan pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan”, hal tersebut menandakan bahwasanya Pilkada adalah kegiatan politik sebagai wujud perubahan yang mendasar bagi proses demokrasi di tingkat lokal dengan penguatan aspirasi dan partisipasi rakyat dalam menentukan pilihan pemimpin daerah secara langsung.⁴ Setiap menjelang Pilkada secara langsung terlihat terdapat dua arus yang mulai membesar. Pertama, mantan pejabat daerah sudah mempersiapkan untuk maju kembali sebelum tahapan-tahapan yang Pilkada yang dilakukan oleh KPU diumumkan. Kedua, dengan mengarahkan tim sukses bayangan dan mengumpulkan

⁴ Dr.Siti Aminah.2014. Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal. Jakarta: Prenadamedia Indonesia.hal 224

masyarakat dalam forum informal.⁵

Dalam bukunya yang berjudul manajemen dan resolusi konflik pilkada Abdul hasri menyatakan bahwa pilkada yang dilaksanakan secara langsung merupakan dasar dari penyelenggaraan demokrasi di tingkat lokal (Kabupaten, Kota, dan Provinsi), yang mana bukan hanya prosedurnya yang lebih demokratis karena memilih secara langsung melainkan sebagai sarana pembelajaran politik dan wujud nyata dari kedaulatan rakyat⁶. Dengan adanya pemilihan secara langsung oleh rakyat membuat nilai demokrasi dan kedaulatan sepenuhnya ada ditangan rakyat yang mana hal tersebut juga dapat meminimalisir kecurangan pada saat pemilihan karena rakyat bebas menentukan siapa yang dipilih menjadi pemimpinnya.

Pemilihan kepala daerah atau pilkada ini dapat memperkuat demokrasi yang sangat penting bagi perkembangan politik dan kesinambungan antara politik lokal dan pusat, serta memperkuat otonomi daerah dalam prinsip negara demokrasi. Karena pemimpin dipilih berdasarkan preferensi mayoritas rakyat terhadap calon-calon yang ada, maka diharapkan unsur yang melibatkan partisipasi publik akan membekali masyarakat dengan nilai-nilai keterbukaan, kemandirian, dan kejujuran. Terlepas dari tujuan pelaksanaannya, Pilkada tetap menjadi arena pertarungan politik di tingkat daerah. Tidak dapat dipisahkan dari gabungan kepentingan individu, kelompok dan partai yang terakumulasi dengan satu tujuan untuk memperoleh kekuasaan, status politik, atau bahkan prioritas dan keistimewaan atas keberadaan partai tertentu. Sehingga tidak jarang dalam kegiatan sosialisasi, silaturahmi, kampanye dan program seru lainnya karena pihak-pihak yang terlibat saling berebut empati pemilih. Namun, tentu saja, tidak semua ini

⁵ Ibid

⁶ Abdul Asri Harahap. 2005. Manajemen dan Resolusi Konflik Pilkada. Jakarta: Cisendo.

dapat dilakukan apa adanya, dan persiapan diperlukan untuk memastikan bahwa strategi yang diterapkan memenuhi tujuannya dan berfungsi dengan benar sesuai kebutuhan. Dengan kata lain, pilkada dapat diartikan sebagai arena perebutan kekuasaan individu untuk kekuasaan.

Tentu saja, pemilihan kepala daerah dimulai pada tahap pencalonan dan pendaftaran, dan didukung secara individu maupun partai politik. Pencalonan biasanya terjadi lobi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan, atau adanya hubungan yang erat antara partai dengan partai calon yang akan menjadi calon wakil daerah dan partai pendukung. . Dalam beberapa kasus, popularitas dan kemampuan seorang kandidat dapat menarik simpati partai ketika mengajukan tawaran untuk menjadi kandidat, dan kondisi ini biasa disebut dengan proposal partai, menurut pandangan kandidat⁷, meliputi:

- 1) Adanya kepemilikan dan dukungan finansial cukup tetapi kurang dari segi popularitas di masyarakat..
- 2) Meskipun dana dan dukungan finansial terbatas, mereka mampu dan populer di masyarakat.
- 3) Ada klaim pribadi atas pendanaan dan dukungan keuangan yang besar, tetapi popularitas besar di masyarakat.
- 4) Walaupun dana dan dukungan finansial terbatas, mereka sangat kharismatik di mata masyarakat, umumnya dikenal sebagai keturunan tokoh-tokoh berpengaruh di daerah.
- 5) Seorang *incumbent* dengan pengalaman yang baik yang ingin dicalonkan kembali untuk masa kepemimpinan berikutnya.

Beberapa kondisi tersebut tentu menjadi banyak pertimbangan bagi suatu partai untuk melakukan pasangan calon dalam persaingan politik baik di

⁷ Haris, Syamsudin, (2005) .*Desentralisasi dan Otonomi Daerah : Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*. Jakarta : LIPI.

tingkat daerah maupun pusat. Selain dukungan partai sebagai kendaraan politik, peserta pemilu juga dapat maju melalui jalur independen.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada, calon perseorangan yang masuk pilkada dapat maju ke pilkada melalui dukun dengan syarat dukungan 6,5-10% dari total pemilih. atau DPT pemilu terakhir. Aplikasi ini dapat membuktikan bahwa Anda memiliki salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) setempat yang juga termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Anda. Masih ada alternatif lain bagi siapa saja yang ingin mencalonkan diri atau terlibat dalam agenda pemilu.

1.5.2 Kekuasaan

Kekuasaan dipahami sebagai penguasaan individu atau kelompok atas individu atau kelompok lain, merupakan sebuah kerangka penilaian tiga dimensi kekuasaan yang terdiri dari tiga sisi, yaitu tingkatan, ruang, bentuk. Dimensi yang pertama menggambarkan kekuasaan yang hanya terfokus pada satu hal, seperti tindakan aktor itu sendiri. Dimensi kedua berfokus pada kepentingan diri sendiri berupa sebuah pilihan atau keluhan. Sedangkan dimensi ketiga menggambarkan aspek pembuatan kebijakan pada agenda politik serta melihat kontrol atas agenda tersebut.

Hal-hal yang berperan dalam kekuasaan diantaranya, aktor-aktor di dalamnya, permasalahan, dan situasi di baliknya, dapat dilihat dengan menggunakan konsep ini. Aktor sekaligus elit memiliki posisi dan peran yang kuat. Dan pembagian kekuasaan menjadi sebuah pokok pembahasan tentang kekuasaan di daerah, seperti kekuasaan yang tampak, kekuasaan yang tersembunyi, dan kekuasaan yang tak kelihatan. Dengan menggunakan lambang kubus yang berarti adanya suatu hubungan antara satu dengan

lainnya saling berhubungan, berinteraksi, dan juga saling mempengaruhi.⁸

Kekuasaan Powercube digunakan dalam mengeksplorasi lebih dalam mengenai ‘kekuasaan untuk’; ‘kekuatan untuk’; ‘kekuasaan dengan’; ‘ekspresi kekuasaan’; ‘kekuasaan dalam’. Bagaimana aktor yang lebih kuat mengontrol aktor yang lemah dalam membangun kesadaran dan tindakan untuk melakukan sebuah perubahan. Dalam dimensi Powercube ini penciptaan ruang dan waktu merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Dalam menciptakan ruang dan waktu, dapat dijadikan sebagai fokus dalam kajian untuk melihat fenomena dari aspek dan kekuatan tertentu, memetakan faktor-faktor yang berperan penting dalam kekuasaan, termasuk aktor-aktor di dalamnya, dan alasan yang melatar belakangnya.

1.5.3 Elite Lokal

Elit dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang terdiri dari individu-individu superior dengan massa yang dapat menguasai jaringan-jaringan kekuasaan baik sedang menduduki kekuasaan atau berada di lingkaran kekuasaan. Pareto dan Mosca membagi kategori elit dalam tiga stratifikasi, sebagai berikut:⁹

1. Governing Elite atau elit yang memerintah
2. Non-Governing Elite atau elit yang tidak memerintah
3. Non- Elite atau massa umum (masyarakat yang masih berada di sekitar elite).

Konteks elit politik¹⁰ (elit yang memerintah) lokal adalah individu atau kelompok yang sedang menduduki tingkat kekuasaan paling tinggi yang menjalankan dan membuat kebijakan politik di tingkat lokal (Walikota, DPRD,

⁸ Abd halim, *Pertarungan Elite Dalam Politik Lokal*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017). hal 58

⁹ Fadli, Muhammad, et al. “Keterlibatan Elit Lokal dalam Peningkatan Partisipasi Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015.” *sosial politik humaniora*, vol.6 No.2, 2018. Diakses pada tanggal 01 Maret 2022

¹⁰ Ibid.

pimpinan partai, Bupati, Gubernur). Elit yang tidak memerintah adalah individu atau kelompok yang menduduki jabatan yang strategis yang dapat mempengaruhi dan memerintah orang lain dalam lingkup masyarakat. Non-elit adalah masyarakat yang berpengaruh dalam masyarakat yang berada di sekitar elit (elit ormas, pengusaha, kepemudaan, elit keagamaan, dan lain sebagainya).

Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah calon kandidat kepala daerah selain membutuhkan adanya dukungan partai juga memerlukan dukungan dari kalangan elit, Pareto mengatakan bahwasanya elit adalah individu atau kelompok kecil yang memiliki kekayaan dan kepandaian yang berkualitas dalam kehidupan sosial dan politik. Sehingga, dukungan elit dapat menjadi keunggulan dari calon kandidat kepala daerah yang menjadi nilai sendiri untuk masyarakat. Pareto¹¹ juga menyatakan elite adalah individu atau kelompok memiliki dan mendapatkan keuntungan yang lebih dibandingkan apa yang dimiliki dan didapatkan oleh orang lain.

Pareto juga membagi elit politik menjadi dua kelompok: (1) "rubah" yang kuat di residu Kelas I dan (2) "singa" atau Hons yang kuat di residu Kelas II. Sementara rubah lebih suka memerintah melalui kerjasama, intrik diplomatik, dan kelicikan, Hons atau singa lebih suka memerintah melalui penggunaan kekuatan politik. Rubah dan singa hidup di bawah semua jenis struktur politik, sikap mereka tidak terpengaruh atau dibentuk oleh bentuk pemerintahan. Pareto mengatakan "Apa pun bentuk pemerintahannya, pria yang memegang kekuasaan memiliki kecenderungan tertentu untuk menggunakan kekuatan itu untuk menjaga diri mereka tetap di pelana, dan, untuk mengamankan keuntungan kelompok dan keuntungan pribadi".¹²

¹¹ Abd halim, *Pertarungan Elite Dalam Politik Lokal*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017). hal 28

¹² Doc. Dr Mustafa Delican, "Elite Theories of Pareto, Mosca, and Michels", <https://www.acarindex.com/pdf/4021-9037.pdf>. Diakses pada tanggal 23 April 2022

1.5.4 Konfigurasi Politik

Konfigurasi politik lokal pada penelitian ini termasuk dalam rumusan *causa efficiens* yang mengaitkan dua gagasan suatu yang diinginkan dapat tercapai dalam satu gagasan operasional yang mana artinya seseorang dapat memiliki kewenangan dalam mempengaruhi sebuah kelompok diharuskan masuk ke dalam golongan yang memiliki peran besar dan mampu memimpin terhadap kelompok lain (pejabat publik). Dengan kata lain, unsur-unsur kekuatan politik yang saling berkaitan akan membentuk suatu konfigurasi politik.

Pada praktik politiknya dalam membentuk konfigurasi politik menurut Bertrand De Jouvenel adalah individu atau kelompok berusaha untuk memberikan dan membawakan suatu tujuan yang dalam menciptakan sebuah tujuan tersebut perlu adanya kontribusi dan dukungan dari orang lain untuk mencapai tujuannya, dan karena hal tersebut individu atau kelompok tersebut akan berusaha untuk memperoleh tindakan kontribusi atau dukungan yang memadai untuk mencapai sebuah tujuan dengan cara menciptakan sebuah citra politik dari keterkaitan unsur-unsur kekuatan politik.

Bertrand juga memberikan contoh kasus bahwa orang yang mampu membentuk konfigurasi politik adalah seseorang yang memiliki kemampuan atau kekuasaan untuk membuat sebuah kebijakan dan tidak ada keraguan untuk mengesahkan dan melaksanakannya. Dalam asumsinya Bertrand juga mengatakan bahwa seorang patriot sejati atau pemimpin dapat menyatukan semua kekuatan pemahamannya dan mengarahkan semua pikiran dan tindakannya untuk kebaikan negaranya atau wilayah kepemimpinannya. Ketika individu atau kelompok membentuk skema politik untuk mencapai sebagai tujuan, maka individu atau kelompok tersebut dapat bekerja di atas kekuasaan dan kewenangan yang didapatkan sebagai bentuk kepuasan dari beberapa kepentingan dari unsur-unsur kekuatan politik.

Di sini Bertrand juga mengutip pendapat Bolingbroke yang menunjukkan bahwa individu atau kelompok yang terjun dalam bidang politik memiliki 4 tujuan diantaranya: 1) tujuan patriotik (ingin pelayanan untuk masyarakat secara adil dan memberikan perubahan yang positif untuk suatu wilayah); 2) strategi besar yang dirancang untuk memastikan pencapaian tujuan tertentu; 3) manuver yang aktif dan fleksibel untuk menjalankan strategi dengan masuk dalam bidang politik; 4) kesenangan dan kepuasan dalam keseluruhan kinerja.

Teori konfigurasi politik ini akan digunakan oleh peneliti sebagai dari penelitian karena teori ini memiliki relevansi dalam menjelaskan fenomena konfigurasi politik lokal masa kepemimpinan MKP di Kabupaten Mojokerto. Dikenal sebagai seorang pengusaha sukses dan berhasil masuk dalam bidang politik membuatnya membangun suatu skema politik dalam pelaksanaan praktik politik lokal menjadikan Bupati MKP memiliki dan memberikan perubahan terhadap wilayah yang dikuasainya dan hal tersebut juga tidak luput dari sebuah kontribusi individu maupun kelompok lain (elit lokal) yang turut andil dalam kinerja Bupati MKP sebagai kepala daerah di Kabupaten Mojokerto. Hal ini relevan dengan pernyataan Bertrand bahwa seseorang yang sudah memiliki kekuasaan mampu melakukan perubahan tanpa ada keraguan didalamnya.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah logika sebagai suatu landasan atau dasar untuk sebuah penelitian. Metode penelitian diperlukan dalam menguji dan menemukan kebenaran sebuah teori ataupun membentuk teori baru. Dalam penelitian ini metode penelitian sebagai suatu prosedur yang dilakukan dalam melakukan penelitian meliputi pengumpulan data dan informasi terkait dengan konfigurasi politik pada masa kepemimpinan Bupati MKP selama dua periode di Kabupaten Mojokerto.

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif deskriptif.¹³ Dalam penelitian ini akan melihat sebuah fenomena secara lebih mendalam. Hasil dari penelitian ini akan secara khusus dan spesifik dari data atau studi literatur dan wawancara secara mendalam. Jenis penelitian kualitatif deskriptif memahami secara mendalam mengenai fenomena konfigurasi politik pada masa kepemimpinan MKP dilihat dari sudut pandang subjek penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena dengan lengkap atau mendeskripsikan pengalaman dan realitas yang dilihat oleh subjek penelitian. Penelitian ini menggunakan tipe kualitatif, agar mendapatkan jawaban dari pertanyaan penelitian dari permasalahan yang ada dengan secara spesifik dan mendalam, hingga menjelaskan sebuah fenomena permasalahan penelitian ini.

1.6.2 Jenis Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri untuk memenuhi tujuan sebuah penelitian tertentu.¹⁴

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti menggunakan sumber seperti jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi, hasil penelitian atau laporan penelitian yang dipublikasi maupun tidak di publikasi, buku-buku, dan dokumen yang diterbitkan oleh pemerintahan.¹⁵

¹³ Aminah, S. (2019). Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu. Politik.

¹⁴ Ibid. hal 106

¹⁵ Ibid.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini guna menemukan data yang didapat adalah sebagai berikut:

1.6.3.1 Teknik Wawancara

Wawancara merupakan sebuah Teknik pengumpulan data melalui tanya jawab yang berlangsung satu arah, wawancara merupakan sebuah proses interaksi dan komunikasi. Dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam (*in depth interview*) merupakan metode wawancara yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif, secara umum wawancara ini dilakukan guna memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Hal yang membedakan bahwa wawancara mendalam dilakukan dengan berkali-kali serta membutuhkan waktu yang cukup lama. Pada metode penelitian ini seorang peneliti mengumpulkan data dari informan dengan teknik wawancara dengan membuat kerangka penelitian dari pokok pembahasan yang akan ditujukan kepada informan. Pertanyaan dalam wawancara bersifat terbuka dan tidak mengarah langsung kepada pertanyaan penelitian, dan peneliti berperan sebagai pengamat untuk dapat melaporkan hasil temuannya secara objektif, jelas serta akurat, sehingga diperlukan ketajaman analisis. Wawancara mendalam *in depth interview* atas informan atas subjek penelitian atau narasumber yang menguasai konten terhadap permasalahan penelitian atau wawancara secara *purposive*.

1.6.3.2 Studi Literatur

Selain menggunakan data primer pada penelitian ini juga

menggunakan data sekunder, yang mana data ditemukan dari penelitian sebelumnya mengenai Bupati MKP, artikel, berita online, dan dokumen yang dapat menjadi temuan data atas penelitian mengenai kepemimpinan Bupati MKP (Mustofa Kamal Pasa) di Kabupaten Mojokerto.

1.6.4 Subjek Penelitian

Subjek Penelitian merupakan individu yang telah berpartisipasi menjadi narasumber yang memberikan informasi dan data mengenai permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini akan mewawancarai pihak-pihak yang pernah berkecimpung dan masuk secara langsung dalam pemberian dukungan serta terdapat pihak yang menentang kepemimpinan Bupati MKP di Kabupaten Mojokerto. Diantaranya:

1. Timses Mustofa Kamal Pasa

- a. Mantan Anggota DPRD tahun 2009-2014

Titin Syafaatin sebagai anggota partai PBB dan mantan DPRD di tahun 2009-2014 juga diangkat sebagai bendahara partai Nasdem di tahun 2015. Dalam penelitian beliau ikut terjun langsung dalam mendukung MKP menjadi Bupati di tahun 2010 dan 2015.

- b. Kerabat serta anggota Tim kemenangan

Tatok sebagai mantan lurah dan juga anggota timses. Dalam penelitian ini beliau ikut mengawal MKP dari sebelum menjadi Bupati hingga menjadi Bupati selama dua periode.

2. Masyarakat

Beberapa masyarakat yang bersedia memberikan pernyataan kinerja Bupati MKP dalam membangun Mojokerto. Sebagai data informasi yang memperkuat penelitian ini.

3. Mantan Anggota LSM Lensa

Dalam penelitian ini mewawancarai mantan anggota LSM Lensa untuk mendapatkan sudut pandang lain tentang informasi terhadap kinerja Bupati MKP dalam membangun Mojokerto.

4. Anggota Fatayat NU

Dalam penelitian ini mewawancarai salah satu anggota Fatayat NU untuk mendapatkan informasi mengenai Bupati MKP dalam menjalin hubungan terhadap Fatayat NU

1.6.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Sebagai penelitian yang menggunakan cara wawancara untuk mendapatkan data dan juga dari studi literatur ,media maupun penelitian sejenis yang telah ada sebelumnya dan bersifat deskriptif merupakan bentuk dari analisis kualitatif. Dalam penelitian kualitatif ada empat teknik analisis data diantaranya adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1.6.5.1 Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara yang dilakukan secara mendalam (*in depth interview*), dan dalam melakukan pengumpulan data menggunakan beberapa referensi berupa artikel, berita, jurnal penelitian, dokumen, buku, literatur dan sebagainya.

1.6.5.2 Reduksi Data

Reduksi data adalah bentuk analisis yang mengelompokkan, menyesuaikan, juga membuang data informasi yang tidak diperlukan dan mengorganisasikannya hingga mendapatkan sebuah kesimpulan. Dari data yang telah didapatkan oleh peneliti tersebut digolongkan kemudian diinterpretasikan apakah sudah sesuai dengan data informasi yang dibutuhkan oleh peneliti atau tidak. Dalam tahap ini, dapat dikatakan sebagai penyortiran data mana data yang sesuai dan mana yang tidak sesuai.

1.6.5.3 Penyajian Data

Penyajian data adalah bentuk dari presentasi data yang telah diperoleh oleh peneliti dalam sebuah penelitian. Dari data yang telah dipilih oleh peneliti selanjutnya akan dikelompokkan berdasarkan fokus penelitian dan disajikan dalam bentuk tabel ataupun bagan agar lebih memudahkan untuk dideskripsikan dan diinterpretasikan.

1.6.5.4 Penarikan Kesimpulan

Data yang telah disajikan dan diinterpretasikan secara teoritik. Maka, tahapan akhir dari analisis data secara kualitatif adalah sebuah